

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

## Studi Kasus Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

Maya Rahma Fathonah

228010016

### ABSTRACT

*This research is based on the main problem of poverty alleviation at the Tasikmalaya City Social Service. This is suspected to be due to the suboptimal implementation of poverty alleviation policies. In line with this, the Tasikmalaya City government has undertaken various efforts to address this issue, including the launch of the Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)*

*This study aims to analyze the Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) policy at the Tasikmalaya City Social Service and to analyze the inhibiting and supporting factors that influence the success of policy implementation. In this study, the researcher used qualitative research methods and descriptive analysis. According to Irawan (2006:5), the qualitative method is called 'Natural inquiry' (because the context is natural, not artificial). Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The research results show that implementation has not been running optimally. There are still obstacles in the information communication aspect. Resources, particularly human resources and budgetary resources, are inadequate in supporting tools for socialization. Dispositional issues are evident in employee discipline and a lack of personal awareness. Bureaucratic structure indicates that all coordination and duties are in accordance with established standards. Communication and bureaucratic structure are the factors influencing successful implementation, while resources and disposition are the inhibiting factors.*

**Keywords: Policy Implementation, Social Services, Poverty Alleviation Program**

### ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Hal ini diduga disebabkan oleh belum maksimalnya Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Selaras dengan hal itu pemerintah kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan tersebut dengan diluncurkannya program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sekaligus menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan metode analisis deskriptif. Menurut Irawan (2006:5) metode kualitatif disebut sebagai '*Natural inquiry*' (karena konteksnya yang natural, bukan artifisial). Teknis analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan dengan optimal. Dari aspek komunikasi informasi masih terdapat kendala, pada aspek sumberdaya khususnya sumber daya manusia dan sumberdaya anggaran pada alat pendukung sosialisasi kurang memadai, pada aspek disposisi dapat terlihat dengan adanya persoalan kedisiplinan pegawai dan kesadaran pribadi masih kurang dan pada aspek struktur birokrasi segala koordinasi dan tupoksi berjalan sudah sesuai standar yang ditentukan. faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah komunikasi dan struktur birokrasi, sedangkan factor penghambatnya adalah sumber daya dan disposisi.

**Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Dinas Sosial, Program penanggulangan kemiskinan**

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang selalu ada disetiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya relatif maupun absolut. Bahkan dengan jurang kemiskinan, memungkinkan untuk menimbulkan permasalahan kesetiap lini, terkhusus akibat dampak pandemi beberapa tahun kebelakang. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sekarang ini menjadi strategi dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan paradigma pembangunan kemanusiaan. Namun dalam implementasi pemberdayaan berkaitan dengan merubah sikap dan perilaku masyarakat yang keliru dan sudah membudaya. Begitu juga dengan partisipasi, memotivasi masyarakat untuk peduli dan mau berpartisipasi dalam program penanggulangan kemiskinan tidaklah mudah. Sifat-sifat individualis, egois dan materialis sudah mengakar di masyarakat. Nilai-nilai kepedulian, ikhlas membantu sesama, gotong-royong sebagai perekat ikatan sosial yang menjadi kapital sosial dimasyarakat sudah luntur. Pengaruh liberalisme dan budaya global yang berkembang dimasyarakat, yang semuanya diukur dengan materi ikut berperan membentuk masyarakat yang egois, individualis dan materialistik. Permasalahan-permasalahan pemberdayaan dan partisipasi ini merupakan tantangan bagi semua pelaku program penanggulangan kemiskinan dimasyarakat.

Partisipasi masyarakat yang tinggi secara kuantitas sebenarnya belum menginterpretasikan bahwa pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan baik. Tingginya partisipasi dalam setiap tahapan kegiatan terjadi karena kesadaran pribadi masyarakat ataukah karena dimobilisasi oleh seorang atau sekelompok orang dalam masyarakat dengan tujuan tertentu. Hal inilah yang perlu dikaji lebih mendalam, agar makna partisipasi masyarakat tidak disamakan dengan mobilisasi masyarakat. Dalam memahami partisipasi dan pemberdayaan inilah yang menjadi masalah utama dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan sebagai manifestasi dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dari uraian diatas terlihat jelas terjadinya ambiguitas dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan strategi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pada satu sisi pelaksana program penanggulangan kemiskinan dihadapkan kepada tuntutan untuk memberdayakan masyarakat dengan memampukan masyarakat miskin yang menjadi sasaran (target group) agar mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan mandiri, namun disisi lain ada batas waktu dan target bagi terlaksanya program penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Setiap implementasi kebijakan pemerintah dalam bentuk program khususnya program penanggulangan kemiskinan pasti ada batas waktunya, karena hal tersebut berkaitan dengan dana bantuan program yang dibatasi tahun anggaran. Dilema inilah yang menyebabkan munculnya sikap ambigu bagi pelaksana program penanggulangan kemiskinan. Sehingga yang terjadi adalah kecenderungan pilihan untuk lebih berorientasi pemberdayaan ataukah lebih berorientasi proyek (project oriented) dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data tahun 2022 Kota Tasikmalaya menduduki peringkat ketiga wilayah penduduk termiskin tertinggi se Jawa Barat tercatat ada 11,53% penduduk miskin di kota ini. Pada dua tahun sebelumnya yakni 2021 dan 2020 Tasikmalaya memiliki persentase penduduk miskin sebanyak 12,72% dan 13,13% atau tercatat 87,13 ribu jiwa pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya menurun sebesar 0,41% dari 89,64 ribu pada tahun 2021.

Angka kemiskinan pada tahun 2018-2021 di kota Tasikmalaya menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya

pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sehingga pada tahun 2020 dan tahun 2021 kemiskinan mengalami kenaikan yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen. Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha serta tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Selaras dengan hal itu pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu diluncurkannya program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) pada tahun 2023. PENA merupakan program bantuan sosial dan jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengembangkan kewirausahaan.

Melalui program ini, KPM BPNT dan PKH diberikan bantuan berupa pelatihan, modal usaha, dan pendampingan untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro atau kecil. Tujuan dari PENA adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat mandiri secara finansial dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Dengan adanya program PENA di kota Tasikmalaya diharapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha berkelanjutan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengurangi tingkat kemiskinan di kota Tasikmalaya. Melalui pendampingan yang diberikan, diharapkan KPM BPNT dan PKH dapat mengelola usahanya dengan baik, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi agen perubahan dalam membangun perekonomian keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dan metode analisis deskriptif. Menurut Irawan (2006:5) metode kualitatif disebut sebagai *Natural Inquiry* (karena konteksnya yang natural, bukan artifisial) atau *Interpretive Inquiry* (karena banyak melibatkan faktor-faktor subyektif baik dari informan, subjek peneliti itu sendiri). Penelitian ini berfokus pada subjek tertentu dan mengkajinya sebagai studi kasus. Pendekatan studi kasus memberikan gambaran dan ilustrasi komprehensif tentang berbagai aspek individu, kelompok, organisasi, program atau situasi social (Rahardjo, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur. Wawancara merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah dimana peneliti akan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara dan dilakukan dengan lebih leluasa dan tidak terlalu terikat dengan susunan pertanyaan pada pedoman wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada plt dinas social, coordinator petugas lapangan, peserta penerima manfaat program bantuan PENA. Skrip wawancara dikembangkan dengan merujuk kepada teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang terdiri dari empat indicator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (display data) dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial kota Tasikmalaya melalui Program PENA : Perspektif Faktor Komunikasi**

Menurut Edward III (2006:157-158) kejelasan informasi merupakan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-burecrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu/mendua. Kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai

persyaratan,tujuan, menghilangkan pilihan dari multi interpersi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terperinci.

Dapat disimpulkan bahwa dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan komunikasi sudah dilakukan oleh semua pihak. Bahwa proses komunikasi antara implementor serta sasaran kebijakan dalam konteks pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dikota Tasikmalaya sudah sesuai harapan dan kenyataan dilapangan. Hal ini terlihat pada faktor komunikasi yang mempengaruhinya terdiri dari faktor utama :

1. Kejelasan informasi. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, dalam komunikasi berjalan secara optimal, dimana pelaksanaan kebijakan sudah bisa memahami secara utuh suatu kebijakan yang sudah ditetapkan dan setiap unsur di dinas sosial sudah bisa menjalankan tugas nya sesuai dengan yang diharapkan. Kejelasan informasi ini diperkuat dengan suatu kebijakan dalam bentuk surat tidak hanya lisan. Sehingga bisa mendukung juga konsistensi informasi.
2. Akurasi informasi seperti cakupan dan ketetapannya juga sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Para pelaksana dilapangan dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi sudah memiliki cakupan informasi yang sesuai dengan sasaran kebijakan tetapi penulis menemukan fakta dilapangan mengalami hambatan bukan karena pelaksana kebijakan tapi dari sisi peserta penerima manfaat itu sendiri sebgai objek dari kebijakan ini.
3. Ketepatan informasi dalam penyampaian informasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya dinilai sudah terencana mulai dari pendataan, pelaksanaan, sampai ke mengkomunikasikan kebijakan. Fakta dilapangan juga menemukan bahwa terkadang peserta penerima manfaat bantuan program PENA tidak ada dilokasi, hal ini merupakan salah satu hambatan karena komunikasi yang akan diberikan informasi tidak menerima informasi secara langsung.

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam implementasi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan diKota Tasikmalaya melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), antara lain:

- 1) Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga

- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan
- 4) Perluasan akses terhadap modal dan sumberdaya
- 5) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penguatan kelembagaan dan sinergi program

### **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial kota Tasikmalaya melalui Program PENA : Perspektif Faktor Sumber Daya**

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159) sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan kota Tasikmalaya pada program PENA dimensi Sumber Daya secara umum sudah mencukupi walaupun masih banyak kekurangan terutama dari sisi lokasi/tempat sebagai fasilitas penunjang untuk dilakukan kegiatan sosialisasi masih disebagian wilayah masih terkendala. Dalam pelaksanaan program PENA diperlukan musyawarah khusus yang melibatkan berbagai unsur baik itu dari internal dinas sosial maupun eksternal. Sehingga implementasi kebijakan dilaksanakan masing-masing unsur sudah tidak perlu lagi memikirkan tempat/lokasi sosialisasi tapi fokus ke pelaksanaan kebijakan. Jangan sampai terkendalanya tempat/lokasi di sebagian wilayah menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan.

### **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial kota Tasikmalaya melalui Program PENA : Perspektif Faktor Disposisi**

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan: kesadaran, pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon kebijakan ke arah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran kebijakan namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi kebijakan. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran kebijakan. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung kebijakan, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan intensif bagi para pelaksana kebijakan agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dimensi disposisi secara umum sudah baik. Dalam melaksanakan

kebijakannya sudah mengarah pada sikap karakteristik dan kecenderungan perilaku para pelaksana kebijakan yang telah berdampak baik terhadap pelaksana kebijakan tersebut.

### **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial kota Tasikmalaya melalui Program PENA : Perspektif Faktor Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menggambarkan tentang struktur organisasi, tugas-tugas dan fungsi-fungsi pejabat organisasi, serta mekanisme organisasi. Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan kedua adalah struktur organisasi pelaksana sendiri. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. (Edward III dalam Agustino (2012;153). Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program/kebijakan secara cepat. Dan hal ini hanya dapat terwujud jika struktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari "*virus webwerian*" yang kaku, terlalu hierarkis dan birokratis.

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan mejadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya kebijakan.

Gerorge Edward III (dalam Winarno, 2008) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan

antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik. Sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Beranjak dari pandangan tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang didapat dilapangan maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pada Dinas Sosial kota Tasikmalaya dilihat dari 4 (empat) aspek belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan 4 (empat) aspek yang diteliti menjelaskan bahwa pada aspek komunikasi dimana kuarangnya sosialisasi yang menyebabkan informasi tidak sepenuhnya tersampaikan, pada aspek sumber daya utamanya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran khususnya pada bidang alat pendukung sosialisasi kurang memadai. Pada aspek disposisi dapat terlihat dengan adanya persoalan kedisiplinan pegawai dan kesadaran pribadi masih kurang, dan pada aspek struktur birokrasi segala koordinasi dan tupoksi berjalan sudah sesuai standar yang ditentukan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Palembang:Alfabeta.

Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.

Handyaningrat, Soewarno. 1995. *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung

Henry, Nicholas, 1998. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali

- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara  
Jakarta
- Kasim, M. 1994. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Erlangga
- Kristiandi, J.R. 1994. *Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Perubahan dan Inovasi Kebijakan dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar
- Saebani Beni, dan Afifudin.(2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Silalahi. 1989. *Sistem Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara
- Silalahi, Uber. (2012) *Metode penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Subarsono, AG.2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suradinata, Ernmaya. 1993. *Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan*. Palembang: Mandar Maju
- Wahab, Abdul Solihin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing